

# PENENTUAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Eta Rahayu dan Eko Budi Santoso

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)  
Jalan Arief Rahman Hakim, Surabaya 60111  
*email* : eko\_budi@urplan.its.ac.id

**Abstrak**—Adanya kesenjangan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Gunungkidul terlihat dari tingginya perbedaan angka kemiskinan dan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) serta terkonsentrasinya kegiatan pada wilayah ibukota kabupaten. Untuk itu penentuan pusat-pusat pertumbuhan secara tersebar diperlukan di Kabupaten Gunungkidul untuk meminimalisir kesenjangan yang terjadi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kecamatan yang layak menjadi lokasi pusat-pusat pertumbuhan. Adapun tahapan analisis yaitu menganalisa calon lokasi berdasarkan sarana-prasarana dengan analisis scalogram dan menganalisa calon lokasi berdasarkan struktur pertumbuhan ekonomi dengan analisis tipologi klassen. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kecamatan yang layak dan tidak layak berdasarkan sarana prasarana dan juga berdasarkan struktur pertumbuhan ekonomi di masing-masing kecamatan. Adapun lokasi pusat-pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen Kecamatan Semanu dan Kecamatan Karangmojo.

**Kata Kunci**—Kabupaten Gunungkidul, pengembangan wilayah, pusat-pusat pertumbuhan

## I. PENDAHULUAN

PENGEMBANGAN wilayah merupakan upaya pembangunan pada suatu wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi dan prasarana fisik secara efektif, optimal dan berkelanjutan. Dimana tujuannya adalah untuk pemerataan pertumbuhan wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah [1]. Namun, kesenjangan wilayah ini merupakan fenomena universal [2]. Pendekatan pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi makro menyebabkan terkonsentrasinya investasi dan sumber daya di perkotaan dan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan, sementara wilayah hinterland mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan. Kesenjangan antar wilayah ini juga terjadi antar kecamatan di Kabupaten Gunungkidul.

Kabupaten Gunungkidul secara geografis mengalami kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan. Dimana dijelaskan bahwa beberapa desa yang jauh dari pusat

kota atau yang berdekatan dengan wilayah Jawa Tengah (Wonogiri, Sukoharjo dan Klaten) mencatat angka kemiskinan sangat tinggi. Sebaliknya, desa-desa di pusat kota cenderung memiliki angka kemiskinan rendah. Misalnya Desa Kepek, desa di dekat pusat Kecamatan Wonosari memiliki angka kemiskinan 16,90 persen, jauh dibawah rata-rata kemiskinan di Gunungkidul yang sebesar 26 persen. Sementara Desa Sumbergiri dan Desa Songbanyu yang sangat jauh dari Kecamatan Wonosari mempunyai angka kemiskinan sekitar 50 persen [3].

Perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan menimbulkan kesenjangan [4]. Hal tersebut terlihat pula dalam PDRB tiap kecamatannya, dimana Kecamatan Wonosari sebagai ibukota kabupaten sekaligus pusat kegiatan wilayahnya memiliki nilai PDRB terbesar dari 18 kecamatan yang ada, yakni sebesar 18,69%. Sementara itu, kontribusi kecamatan lainnya masih berada dibawah 10%. Bahkan Kecamatan Purwosari yang berada jauh dari Kecamatan Wonosari hanya memiliki nilai PDRB sebesar 2,84% [5]. Perbedaan angka PDRB yang cukup signifikan tersebut membuktikan kesenjangan ekonomi Kabupaten Gunungkidul sangat tinggi dan belum tercapainya pemerataan.

Disisi lain, ketimpangan ekonomi wilayah juga dikarenakan terkonsentrasinya kegiatan pada wilayah tertentu [6]. Saat ini pusat kegiatan di Kabupaten Gunungkidul hanya terfokus pada Kecamatan Wonosari yang sekaligus menjadi ibukota kabupaten. Maka, perkembangan wilayahnya menjadi kurang efektif dan pusat pertumbuhan yang ada tidak dapat manjangkau keseluruhan wilayah.

Salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan pengembangan wilayah adalah dengan mengembangkan wilayah tertentu menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*) secara menyebar [6]. Karena pusat pertumbuhan tersebut menganut konsep konsentrasi dan desentralisasi sekaligus. Pusat-pusat pertumbuhan baru ini dapat dipacu dan berkembang dengan cepat dan signifikan [2].

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Gunungkidul 2010-2030 terdapat penentuan pusat kegiatan lokal, salah satunya adalah Kecamatan Rongkop. Namun, jika ditilik pada publikasi PDRB Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 ditunjukkan bahwa Kecamatan Rongkop merupakan

kecamatan tertinggal. Pusat pertumbuhan (*growth pole*) tidak terjadi di segala tempat, tetapi hanya terbatas pada tempat-tempat tertentu, yang mempunyai berbagai variabel dengan intensitas yang berbeda-beda [1]. Jika ditinjau secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu wilayah yg memiliki banyak fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) [7].

Berangkat dari hal tersebut, maka kecamatan - kecamatan yang ada pada Kabupaten Gunungkidul dinilai perlu diidentifikasi untuk dikembangkan sebagai pusat-pusat pertumbuhan baru. Sehingga diharapkan dengan keberadaan pusat-pusat pertumbuhan yang baru, hasil pembangunan serta ekonominya mempunyai efek menyebar dan terjadi pemerataan di setiap kecamatan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kecamatan yang layak menjadi lokasi pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Gunungkidul. Sasaran yang dilakukan yaitu menganalisa calon lokasi yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana prasarannya serta menganalisa calon lokasi yang dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Gunungkidul, maka langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan teori-teori yang berkaitan dengan konsep penentuan pusat-pusat pertumbuhan sehingga menghasilkan variabel-variabel. Lalu pada tahap analisis calon lokasi di analisis berdasarkan pada kondisi empiris. Hal yang dimaknai sebagai kondisi yang mempengaruhi penentuan pusat-pusat pertumbuhan yaitu ketersediaan sarana prasarana dan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi.

### B. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis scalogram dan tipologi klassen. Analisis scalogram adalah analisis yang bertujuan mengidentifikasi peranan suatu kecamatan berdasarkan pada kemampuan masing-masing kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Asumsinya jika suatu kecamatan mempunyai berbagai fasilitas yang relatif lengkap dibandingkan dengan kecamatan lainnya, maka kecamatan tersebut mampu berperan sebagai suatu pusat pertumbuhan pada kawasan tersebut. Variabel yang digunakan adalah sarana ekonomi (pasar, koperasi, bank), sarana kelembagaan (kantor pemerintahan, kantor polisi, kantor pos), sarana kesehatan (rumah sakit, pukesmas, pustu, praktek dokter, klinik), sarana pendidikan (TK, SD/MI, SMP/Mts, SMA/SMK/MA), tenaga listrik, jaringan jalan (jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten), dan sarana telekomunikasi.

Kemudian analisis tipologi klassen merupakan alat analisis

yang digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan (PDRB) per kapita daerah dimana akan terbentuk empat klasifikasi kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Pendapatan Perkapita	$Y_i > Y_n$	$Y_i < Y_n$
Laju pertumbuhan		
$r_i > r_n$	Kecamatan maju dan tumbuh cepat	Kecamatan Berkembang Cepat
$r_i < r_n$	Kecamatan maju tapi tertekan	Kecamatan Relatif Tertinggal

Gambar. 1. Diagram tipologi Klassen.

Keterangan:

$r_i$  : Laju pertumbuhan PDRB Kecamatan i

$r_n$  : Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten

$Y_i$  : Pendapatan per kapita Kecamatan i

$Y_n$  : Pendapatan per kapita Kabupaten

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan Ibukotanya Wonosari. Kabupaten Gunungkidul memiliki luas 1.485,39 km<sup>2</sup> atau  $\pm$  46,63 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis terletak antara 110° 21' sampai 110° 50' BT dan 7° 46' sampai 8° 09' LS dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Timur : Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah;
- Barat : Samudra Hindia;
- Selatan : Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, DIY

Kabupaten Gunungkidul terdiri atas 18 Kecamatan dan 144 desa dimana ibukota Kabupaten Gunungkidul terletak di Kecamatan Wonosari.

### B. Analisa calon lokasi berdasarkan ketersediaan sarana prasarana

Dalam menganalisa calon lokasi berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana ini digunakan teknik analisa scalogram. Dimana tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kecamatan-kecamatan yang dapat dikelompokkan menjadi calon pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan pada sarana prasarana yang tersedia. Prinsip analisisnya yaitu pemberian skor untuk setiap fasilitas dari masing-masing sarana prasarana (fasilitas ekonomi, sosial, dan fasilitas kesehatan, dan sebagainya). Jika dalam kecamatan tersebut memiliki sarana seperti yang tertera pada variabel maka diberi nilai 1 (satu), sebaliknya jika tidak memiliki sarana tersebut diberi nilai 0 (nol).

Dari hasil analisis didapat 4 hirarki yang terbentuk, yaitu:

1. Hirarki 1 merupakan kelompok kecamatan yang memiliki seluruh fasilitas yaitu Kecamatan Semanu, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Playen.

2. Hirarki 2 merupakan kelompok kecamatan yang memiliki 18 dan/atau 17 fasilitas yaitu Kecamatan Ponjong, Kecamatan Patuk, Kecamatan Panggang, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Karangmojo, dan Kecamatan Nglipar.
3. Hirarki 3 merupakan kelompok kecamatan yang memiliki 16 dan/atau 15 fasilitas yaitu Kecamatan Tepus, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Gedangsari, dan Kecamatan Semin.
4. Hirarki 4 merupakan kelompok kecamatan yang hanya memiliki 14 dan/atau 13 fasilitas yaitu Kecamatan Saptosari, Kecamatan Purwosari, dan Kecamatan Tanjungari.

Klasifikasi berdasarkan hirarki ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Pada hirarki keempat, ketiga kecamatan tersebut dalam bidang kesehatan sama –sama tidak memiliki fasilitas rumah sakit. Hal ini tentu akan mengurangi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat walaupun sudah terdapat pukesmas maupun pukesmas pembantu, akan tetapi untuk menjadi pusat



pertumbuhan sebuah wilayah harus mampu melayani hinterlandnya termasuk dalam bidang kesehatan. Di bidang kelembagaan kantor pos merupakan fasilitas yang penting yang harus disediakan karena fasilitas ini mengakomodasi pergerakan barang, sebuah pusat pertumbuhan seharusnya memiliki fasilitas ini. Bahkan ketiga kecamatan ini juga tidak memiliki jalan dengan klasifikasi sebagai jalan nasional, tentu jalan yang ada belum mampu menampung pergerakan orang maupun barang dengan baik. Kemudian fasilitas ekonomi yang belum disediakan pada ketiga kecamatan ini, baik berupa koperasi maupun bank menunjukkan bahwa kecamatan ini belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dalam pelayanan fasilitas koperasi maupun bank, dimana kedua fasilitas ekonomi ini penting untuk mengakomodasi ekonomi yang menunjang kecamatan tersebut maupun kecamatan hinterland. Dengan demikian ketiga kecamatan ini dinilai tidak mampu melayani kecamatan apabila menjadi pusat pertumbuhan karena dengan kurangnya fasilitas yang ada tentu akan menghambat pelayanan terhadap masyarakat pada pusat

maupun hinterlandnya.

*C. Analisa calon lokasi berdasarkan struktur ekonomi*

Analisa calon lokasi berdasarkan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi ini menggunakan teknik analisa tipologi klassen. Prinsip dari pemilihan calon lokasi berdasarkan kondisi struktur pertumbuhan ekonomi ini adalah membandingkan antara laju pertumbuhan kecamatan dengan laju pertumbuhan kabupaten dan pendapatan per kapita kecamatan dengan pendapatan per kapita kabupaten. Untuk lebih jelasnya tabel berikut ini mengakomodir perbandingan tersebut sehingga nantinya dapat diklasifikasikan seperti pada kuadran.

Dari tabel tersebut kemudian diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi pada kuadran, hasilnya sebagai berikut.

Tabel 1.

Kondisi struktur pertumbuhan ekonomi dengan tipologi klassen

K*	LJ*	$r_i > r_n$	$r_i < r_n$	PPK*	$Y_i > Y_n$	$Y_i < Y_n$
Panggang	4,40		✓	4.505.273		✓
Paliyan	3,56		✓	4.677.694		✓
Tepus	3,45		✓	4.054.267		✓
Rongkop	4,35		✓	4.332.692		✓
Girisubo	4,58		✓	5.347.886	✓	
Semanu	4,77	✓		4.715.362		✓
Ponjong	3,91		✓	5.479.695	✓	
Karangmojo	4,85	✓		4.634.758		✓
Wonosari	5,97	✓		7.120.196	✓	
Playen	4,84	✓		5.036.361		✓
Patuk	4,54		✓	4.799.409		✓
Gedangsari	4,00		✓	3.681.908		✓
Nglipar	3,86		✓	5.692.109	✓	
Ngawen	4,15		✓	4.426.483		✓
Semin	4,32		✓	5.335.251	✓	

\*K – Kecamatan.

\*LJ – Laju Pertumbuhan

Pendapatan Perkapita		
	$Y_i > Y_n$	$Y_i < Y_n$
Laju pertumbuhan		
$r_i > r_n$	Wonosari	Semanu Playen Karangmojo
$r_i < r_n$	Girisubo Nglipar Ponjong Semin	Panggung Paliyan Tepus Rongkop Patuk Gedangsari Ngawen

Gambar 3. Klasifikasi struktur pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul

Dari analisis tersebut dapat dilihat bahwa terdapat beberapa kecamatan yang diklasifikasikan sebagai kecamatan maju dan tumbuh cepat, kecamatan maju tapi tertekan, kecamatan berkembang cepat, serta kecamatan yang relatif tertinggal. Detail klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut.

**1. Kecamatan maju dan tumbuh cepat**

Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini merupakan kecamatan yang mengalami pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten. Kecamatan ini adalah kecamatan paling maju dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi dan jika dimanfaatkan dengan baik akan membuat kesejahteraan masyarakat meningkat. Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini adalah Kecamatan Wonosari.

Kecamatan Wonosari merupakan ibukota kabupaten pada kondisi eksisting saat ini. Laju pertumbuhannya sebesar 5,97 % jauh lebih tinggi daripada laju pertumbuhan Kabupaten Gunungkidul itu sendiri yang hanya sebesar 4,59 %. Lalu besar nilai pendapatan perkapita Kecamatan Wonosari sebesar Rp7.120.196,-. Nilai tersebut berada diatas laju pertumbuhan dan per kapita tingkat kabupaten Gunungkidul. PDRB kecamatan Wonosari pada tahun 2012 sebesar Rp599.713,- merupakan PDRB paling tinggi dibanding kecamatan lainnya, bahkan jika dibandingkan PDRB kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012 yang hanya sebesar Rp202.365,-. Kecamatan Wonosari memiliki kondisi ekonomi yang baik dan seperti analisis sebelumnya dimana Kecamatan Wonosari juga termasuk kecamatan dengan kelengkapan fasilitas yang ada, maka dapat dinilai bahwa Kecamatan Wonosari merupakan kecamatan yang maju dan tumbuh cepat.

Pada klasifikasi ini Kecamatan Wonosari dinilai layak untuk menjadi pusat pertumbuhan karena memiliki struktur perekonomian yang baik.

**2. Kecamatan maju tapi tertekan**

Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini merupakan kecamatan yang relatif maju akan tetapi laju pertumbuhan ekonominya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini adalah Kecamatan Girisubo, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Semin.

Kecamatan Girisubo merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan sebesar 4,35 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp5.347.886,- dan nilai PDRB-nya adalah sebesar Rp125.009,- yang merupakan PDRB terendah ketiga di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012. Kemudian Kecamatan Nglipar memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 4,00 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp5.692.109,- dengan PDRB sebesar Rp186.619,- di tahun 2012.

Ketiga, Kecamatan Ponjong merupakan kecamatan yang memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 4,77 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp5.479.695,-. Terakhir, Kecamatan Semin memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 4,15 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp5.520.508,-.

Keempat kecamatan ini memiliki nilai laju pertumbuhan dibawah Kabupaten Gunungkidul akan tetapi pendapatan per kapitanya berada di atas Kabupaten Gunungkidul.

Jika ditilik dari segi fasilitas yang tersedia, Kecamatan Girisubo dan Kecamatan Semin berada pada hirarki ketiga dimana tidak memiliki rumah sakit dan juga koperasi, juga tidak memiliki bank pada Kecamatan Semin dan tidak memiliki kantor pos pada Kecamatan Girisubo. Jika kecamatan ini dijadikan pusat pertumbuhan maka kebutuhan akan fasilitas ekonomi dalam hal ini bank dan fasilitas distribusi barang berupa kantor pos akan menekan kecepatan pertumbuhan ekonomi, sehingga mereka tidak memiliki efek yang meluas pada hinterlandnya. Untuk Kecamatan Ponjong memang secara fasilitas hanya rumah sakit yang tidak tersedia sedangkan dan Kecamatan Nglipar tidak memiliki fasilitas rumah sakit dan tidak memiliki kelas jalan berupa jalan nasional. Ditambah pula jika ditilik dari laju pertumbuhan PDRBnya dapat dilihat bahwa Kecamatan Ponjong hanya sebesar 3,91 % dan Kecamatan Nglipar sebesar 3,86 %.

Kemudian jika ditilik dari jumlah penduduk (berhubungan dengan tenaga kerja), Kecamatan Girisubo dan Kecamatan Nglipar memiliki jumlah penduduk yang sangat rendah yaitu 22.290 jiwa dan 29.865 jiwa. Jumlah tersebut masih berada dibawah rata – rata penduduk Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan untuk Kecamatan Semin dan Kecamatan Ponjong jumlah penduduknya diatas rata – rata kabupaten sebesar 49.250 jiwa dan 50.030 jiwa, akan tetapi dari segi fasilitas dan struktur ekonominya masih belum memadai untuk dijadikan sebagai pusat pertumbuhan. Sehingga keempat kecamatan ini dinilai belum layak menjadi pusat pertumbuhan jika didasarkan dari ketersediaan fasilitas yang penting untuk kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan, jumlah penduduk yang berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja dan ketiga kecamatan ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih berada dibawah Kabupaten Gunungkidul.

**3. Kecamatan berkembang cepat**

Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini merupakan kecamatan yang memiliki potensi pengembangan sangat besar namun belum dapat dikelola dengan baik. Jadi walaupun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah. Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini adalah Kecamatan Semanu, Kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Playen.

Kecamatan Semanu merupakan salah satu kecamatan yang memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 4,68 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp4.715.362,- dengan nilai PDRB tahun 2012 sebesar Rp257.068,-. Serta Kecamatan Playen memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 4,85 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp5.036.361,- dengan nilai PDRB tahun 2012 sebesar Rp290.184,-. Kecamatan Karangmojo memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 3,91 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp4.634.758,- dengan nilai PDRB tahun 2012 sebesar Rp236.301,-. Ketiga kecamatan ini memiliki nilai pendapatan per kapita dibawah Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar Rp5.124.873,- akan tetapi laju pertumbuhannya berada di atas Kabupaten Gunungkidul sebesar 4,59 % dan nilai PDRB pada tahun 2012 tersebut diatas rata – rata Kabupaten Gunungkidul yang hanya sebesar Rp202.365,-.

Jika dikaitkan dengan dari jumlah penduduk dan kelengkapan fasilitas yang ada Kecamatan Semanu memiliki jumlah penduduk sebanyak 51.972 jiwa dengan fasilitas yang lengkap. Kemudian Kecamatan Playen berpenduduk sebanyak 55.084 jiwa dan fasilitas yang tersedia juga lengkap. Sedangkan untuk Kecamatan Karangmojo memiliki jumlah penduduk sebanyak 48.989 jiwa, akan tetapi fasilitas rumah sakit belum tersedia pada kecamatan ini.

Ketiga kecamatan ini memiliki peluang sebagai kecamatan yang cepat berkembang, artinya walaupun secara pendapatan per kapita lebih rendah dari pendapatan per kapita kabupaten akan tetapi laju pertumbuhannya lebih tinggi dari laju pertumbuhan kabupaten. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada kegiatan yang tertekan di kecamatan ini, dengan demikian kecamatan ini di nilai mampu berkembang pesat. Oleh karena itu kecamatan tersebut layak menjadi pusat pertumbuhan.

#### **4. Kecamatan yang relatif tertinggal**

Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini merupakan kecamatan yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapitanya dibawah rata-rata. Ini berarti tingkat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonominya berada di bawah rata-rata Kabupaten Gunungkidul. Kecamatan yang berada pada klasifikasi ini adalah Kecamatan Panggang, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Tepus, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, dan Kecamatan Ngawen.

Kecamatan Panggang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 4,40 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp4.505.273,- dengan PDRB tahun 2012 sebesar Rp125.399,-. Lalu Kecamatan Paliyan memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 3,56 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp4.677.694,- dengan PDRB

tahun 2012 sebesar Rp141.676,-. Kecamatan Tepus memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 3,45 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp4.054.267,- dengan PDRB tahun 2012 sebesar Rp134.402,-. Kemudian Kecamatan Rongkop memiliki laju pertumbuhan sebesar 4,58 % dan nilai pendapatan per kapita sebesar Rp4.332.692,- dengan PDRB tahun 2012 sebesar Rp128.154,-. Kecamatan Patuk memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 4,54 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp4.799.409,- dengan PDRB tahun 2012 sebesar Rp165.111,-. Kecamatan Gedangsari memiliki laju pertumbuhan sebesar 4,15 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp3.681.908,- dengan PDRB tahun 2012 sebesar Rp135.170,-. Serta Kecamatan Ngawen memiliki nilai laju pertumbuhan sebesar 3,86 % dan pendapatan per kapita sebesar Rp4.426.483,- dengan PDRB tahun 2012 sebesar Rp148.499,-.

Tujuh kecamatan ini memiliki nilai pendapatan per kapita dibawah Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar Rp5.124.873,- dan laju pertumbuhannya juga berada di bawah Kabupaten Gunungkidul sebesar 4,59 %. Angka PDRB pada 2012 juga menunjukkan bahwa PDRB kecamatan tersebut berada dibawah rata-rata Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp202.365,-. Maka dengan kondisi ekonomi seperti disebutkan sebelumnya ketujuh kecamatan ini tidak layak menjadi pusat pertumbuhan.

Dari keseluruhan detail yang dijabarkan diatas maka kecamatan yang berada pada klasifikasi kecamatan maju dan tumbuh cepat serta kecamatan yang berkembang cepat merupakan kecamatan yang layak sebagai pusat pertumbuhan yaitu terdiri dari Kecamatan Wonosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Playen. Sedangkan kecamatan yang berada pada klasifikasi kecamatan maju tapi tertekan serta kecamatan tertinggal merupakan kecamatan yang tidak layak menjadi pusat pertumbuhan yaitu terdiri dari Kecamatan Girisubo, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Semin Kecamatan Panggang, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Tepus, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, dan Kecamatan Ngawen.

Sehingga, dari 15 kecamatan yang menjadi input analisis ini, 11 kecamatan dinilai menjadi kecamatan yang tidak layak menjadi pusat pertumbuhan. Sehingga, kecamatan yang layak menjadi pusat-pusat pertumbuhan terdapat 4 kecamatan yaitu Kecamatan Wonosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Playen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar. 4. Pusat-Pusat Pertumbuhan terpilih di Kabupaten Gunungkidul

#### IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

##### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dari 18 kecamatan, kecamatan yang tidak layak menjadi pusat-pusat pertumbuhan berdasarkan ketersediaan sarana prasarana terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Purwosari.
2. Dari 15 kecamatan, kecamatan yang layak menjadi pusat pertumbuhan berdasarkan struktur ekonomi adalah kecamatan yang berada pada klasifikasi sebagai kecamatan maju dan kecamatan berkembang cepat dimana terdiri 4 kecamatan yaitu Kecamatan Wonosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Playen, dan Kecamatan Karangmojo.

##### B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi penelitian ini adalah:

1. Dalam studi lanjut mengenai penentuan pusat - pusat pertumbuhan, penentuan *hinterland*-nya terlampau rawan jika hanya menggunakan analisa gravity model saja karena variabel yang digunakan salah satunya didasarkan pada jumlah penduduk sedangkan temuan pusat pertumbuhan tidak selalu berdasarkan banyaknya jumlah penduduk tetapi juga variabel lain. Jika pusat pertumbuhan yang ditentukan ternyata memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit dan calon *hinterland*-nya memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak tentu akan terbalik posisinya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis E.R. mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan finansial melalui Beasiswa Bidik Misi tahun 2010-2014.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Adisasmita, *Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu (2008).
- [2] E. Rustiadi, S. Saefulhakim, and D. R. Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia (2009)
- [3] (Monograph Online Sources) E. Sutoro. (2013, October, 7). *Potret dan Ragam Kemiskinan di 6 Daerah (1/2)*. Available: <http://www.otonomidaerah.org/potret-dan-ragam-kemiskinan-daerah/>
- [4] R. Adisasmita, *Teori - Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu (2013)
- [5] Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, PDRB Kecamatan di Gunungkidul Tahun 2011
- [6] Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Press (2012)
- [7] I. Nugroho and R. Dahuri. *Pembangunan Wilayah Perspektif ekonomi, Sosial & Lingkungan*. Jakarta: LP3ES (2004)